

Pengelolaan Aset Tidak Berwujud dalam Keberlanjutan Ekowisata Masyarakat Pesisir: Studi Ekowisata Kabupaten Bekasi

Ni Putu Eka Widiastuti^{*1}, Kusumajanti², Asep Kamaluddin Nashir²

Affiliation:

¹ Faculty of Economics and Business, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Indonesia

² Faculty of Social and Political Science, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Indonesia

*Correspondence:

putueka@upnvj.ac.id

This Article is Available in:

<https://journal.umy.ac.id/index.php/jati/article/view/19168>

DOI:

<https://doi.org/10.18196/jati.v7i1.19168>

Citation:

Widiastuti, N., Kusumajanti, K., & Nashir, A. (2024). Pengelolaan Aset Tidak Berwujud dalam Keberlanjutan Ekowisata Masyarakat Pesisir: Studi Ekowisata Kabupaten Bekasi. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 7(1), 1-15.
doi:<https://doi.org/10.18196/jati.v7i1.19168>

Article History

Received:

04 September 2023

Reviewed:

27 September 2023

Revised:

09 November 2023

Accepted:

27 January 2024

Topic Article:

Accounting, Management, Behavioral Accounting

Abstract:

This study aims to analyze the management of intangible assets community investment for the sustainability of coastal ecotourism in Bekasi Regency, West Java. The study uses a qualitative method with a case study approach to Sunge Jingkem ecotourism. Data collection was carried out through unstructured interviews with 7 key actors, in-depth field observations at the ecotourism site, and a Focus Group Discussion with 12 ecotourism enthusiasts. The study found that community investment, dominated by a group of young tourism enthusiasts, is the main intangible asset in the sustainability of Sunge Jingkem Ecotourism. The implementation of the CIDBER (Community Investment for The Development of Bekasi Regency) concept in the management of coastal community-based ecotourism in Bekasi Regency has been able to enhance ecotourism development and sustain its sustainability through the harmonization of human behavior (involving three parties: the government, the community, and tourists). This study contributes to the field of behavioral accounting by utilizing information on the harmonization of the three parties to realize the concept of sustainable ecotourism accounting in economic, social, and environmental.

Keywords: Intangible Assets; Sustainability of Coastal Ecotourism; Ecotourism; Community Investment; Coastal Communities.

Abstrak:

Studi ini berupaya menganalisis pengelolaan aset tidak berwujud *community investment* dalam keberlanjutan ekowisata masyarakat pesisir Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus ekowisata Sunge Jingkem. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tidak terstruktur terhadap 7 aktor kunci, observasi lapangan yang mendalam di lokasi ekowisata, dan *Focus Group Discussion* terhadap 12 orang penggiat ekowisata. Studi ini menemukan bahwa *community investment* yang didominasi oleh kelompok pemuda penggiat wisata merupakan aset tidak berwujud utama dalam keberlanjutan Ekowisata Sunge Jingkem. Implementasi konsep CIDBER (*Community Investment for The Development of Bekasi Regency*) dalam pengelolaan ekowisata masyarakat pesisir Kabupaten Bekasi mampu meningkatkan pembangunan ekowisata dan mempertahankan keberlanjutannya melalui harmonisasi perilaku manusia (*three parties*: pemerintah, masyarakat, dan wisatawan). Studi ini memberikan kebaruan pada ilmu akuntansi keperilakuan, yaitu menggunakan informasi harmonisasi *three parties* dalam mewujudkan konsep akuntansi ekowisata berkelanjutan, baik dari segi ekonomi, sosial dan lingkungan.

Kata Kunci: Aset Tidak Berwujud; Keberlanjutan Ekowisata Masyarakat Pesisir; Ekowisata; Investasi Kelompok Masyarakat; Masyarakat Pesisir.

PENDAHULUAN

Penelitian ini dilatarbelakangi atas visi Pemerintah agar pembangunan ekonomi terus ditingkatkan dan mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang lebih baik, khususnya dalam aspek ekonomi maritim sesuai dengan visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan (SKPT, 2023). Posisi Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki potensi maritim yang menjadi berkah untuk dimanfaatkan bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Kalthar & Itaya, 2021; Saksono, 2013). Dibawah kelola Kementerian Kelautan dan Perikanan, banyak potensi bisnis berbasis sumber daya kelautan yang bisa menjadi peluang ekonomi dan meningkatkan pembangunan ekonomi, seperti industri perikanan, pariwisata, industri pengolahan, industri jasa kelautan, dan industri ramah lingkungan. Namun, dari potensi sumber daya yang ada, baru sekitar 55% digunakan dan baru 22% yang berkontribusi langsung pada pembangunan ekonomi (Iskandar, 2015). Pengelolaan wilayah pesisir di Indonesia juga belum tertata dengan baik, dimana beberapa wilayah masih mengabaikan aspek konservasi ekosistem yang menimbulkan masalah signifikan terhadap kelestarian lingkungan, yang berdampak pada kerugian ekonomi akibat kurangnya *human capital* dan *community investment* (Kalthar & Itaya, 2021; Neumann et al., 2017; Trinanda, 2017)

Dibalik permasalahan pembangunan ekonomi lingkungan pesisir Indonesia, terdapat kawasan pesisir yang potensial dikembangkan sebagai model ekowisata, salah satunya kawasan pesisir di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kabupaten Bekasi merupakan salah satu wilayah dengan potensi wisata bahari, karena letaknya dekat dengan garis pantai. Luas pesisir pantai di Kabupaten Bekasi mencapai 8.020 hektar, oleh karena itu pemerintah setempat berinovasi dan memanfaatkan potensi alamnya untuk menjadi destinasi unggulan ekowisata. Ekowisata sendiri merupakan bentuk wisata berwawasan lingkungan dengan mengutamakan aspek konservasi alam, pemberdayaan sosial budaya, ekonomi masyarakat lokal, serta aspek pembelajaran dan pendidikan (Palmer & Chuamuangphan, 2018; Wurlianty, 2020). Ekowisata sebagai destinasi juga memiliki kriteria wisata berbasis alam, melibatkan masyarakat, berkontribusi pada pelestarian alam, mengedukasi dan memberikan pengalaman serta kepuasan kepada pengunjung (Schreiber et al., 2020; Dahuri et al., 2008; Neumann et al., 2017; Giriwati et al., 2019). Salah satu destinasi ekowisata yang terkenal di Kabupaten Bekasi adalah kawasan Ekowisata Sunge Jinkem, Sembilangan, Kecamatan Tarumajaya. Dengan adanya prinsip dasar yang terkandung pada realisasi ekowisata, pengelolaan yang baik di kawasan Ekowisata Sunge Jinkem diharapkan dapat menjadi aset desa yang berpotensi menyokong pembangunan ekonomi Kabupaten Bekasi.

Ekowisata yang baik berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi lokal suatu wilayah, karena dengan adanya ekowisata, tingkat kunjungan turis akan meningkat dan berdampak pada terciptanya lapangan kerja baru dan sumber pendapatan ekonomi baru, sehingga secara alami membuat ekonomi lingkungan sekitar meningkat (Sultana, 2022). Tidak hanya terhadap pembangunan ekonomi, ekowisata yang baik juga berpengaruh terhadap pembangunan sosial. Ekowisata mampu meningkatkan pemberdayaan dan kesadaran masyarakat, karena sering kali melibatkan komunitas lokal untuk berpartisipasi dalam industri pariwisata, sehingga masyarakat dapat meningkatkan keterampilan mereka dan memunculkan aktor baru yang menjadi ikon penggerak wisata (Mulyana, 2019). Selain itu, ekowisata yang baik juga berpengaruh terhadap pembangunan lingkungan seperti pelestarian alam, karena ekowisata yang baik mampu mempromosikan pemeliharaan ekosistem untuk melindungi dan mempertahankan keanekaragaman hayati, menciptakan kesadaran lingkungan terhadap pengunjung, pengelola, ataupun pemerintah yang terlibat, dan meningkatkan praktik berkelanjutan (Andita & Kahfi, 2019).

Hubungan pengelolaan ekowisata dengan pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan ini menunjukkan hubungan kausalitas, yang apabila satu aspek tercapai maka

akan memengaruhi yang lain, oleh karenanya ekowisata yang baik ini terkait erat untuk menjadi alat pembangunan berkelanjutan, karena ciri tercapainya keberlanjutan adalah adanya pembangunan *triple bottom line sustainability*, dalam hal ini ekonomi, sosial dan lingkungan (Gumede & Nzama, 2019; Sultana, 2022). Ekowisata sebagai alat pembangunan berkelanjutan juga menjadi bentuk informasi akuntansi dalam akuntansi keperilakuan, karena dalam konteks keperilakuan, ekowisata yang baik dapat membantu entitas bisnis atau organisasi (dalam hal ini destinasi wisata) untuk mengukur dan melaporkan dampak sosial, dan lingkungan secara transparan, serta memastikan bahwa operasional wisata sejalan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan. Praktik keperilakuan ini dapat memengaruhi keputusan keuangan dan operasional yang diambil oleh entitas bisnis tersebut (Kabuhung, 2013). Ekowisata sebagai isu akuntansi keperilakuan terlihat dari perspektif pelaporan dan pengelolaan sumber daya dalam konteks bisnis atau organisasi yang terlibat dalam industri ekowisata. Pengukuran dampak sosial dan lingkungan terlihat dari operasi ekowisata, termasuk bagaimana melacak dan melaporkan dampak positif dan negatif pada masyarakat setempat dan lingkungan, serta mencari cara untuk meminimalkan dampak negatif. Pengelolaan sumber daya ekowisata yang berbasis keperilakuan juga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak sebagai Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mempercepat pengembangannya, karena sinergi antar pihak dapat mengantarkan masyarakat mencapai tujuan pengembangan potensi ekowisata. Pihak terlibat ini umumnya terdiri dari *Three Parties*, yaitu pemerintah, masyarakat, dan pihak ketiga (instansi/swasta dan wisatawan). Ketiga pihak ini berkolaborasi dalam menentukan agenda keberlanjutan yang meliputi ekonomi, sosial dan lingkungan (Widowati et al., 2019).

Beberapa studi memotret keperilakuan manusia dan harmonisasi antar pihak berpengaruh dalam pengelolaan ekowisata yang baik, seperti ditunjukkan oleh hasil penelitian Bataille et al., (2020) yang memperlihatkan peran *stakeholder* dalam pembangunan ekowisata Te Urewera, Selandia Baru. Penelitian ini menunjukkan ekowisata dikelola dengan harmonisasi antara pemerintah yang ikut adil pada hak, kekuasaan, tugas, dan kewajiban hukum, sedangkan pihak non pemerintah andil dalam hal menjaga warisan sumber daya. Keterlibatan berbagai pihak dalam pembangunan ekowisata juga ditunjukkan dalam penelitian Bhuiyan et al., (2016), dalam pembangunan ekowisata Danau Kenyir, Terengganu, Malaysia. Penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan ekowisata berkelanjutan memerlukan hubungan erat antara sumber daya alam yang menjadi objek destinasi, dan sumber daya manusia yang menjadi objek pendukung. Sumber daya tersebut meliputi hubungan masyarakat, pemerintah, wisatawan dan komunitas terkait dengan objek destinasi yang dikembangkan. Dari berbagai hubungan sumber daya alam dan manusia, sumber daya masyarakat dan wisatawan memiliki tingkat keberlanjutan yang paling buruk, dan berada dalam tingkat tidak memiliki potensi berkelanjutan. Selanjutnya, dalam penelitian Imur & Junaeda (2022) di Kawasan Ekowisata Taman Nasional Komodo, Indonesia, potret harmonisasi antar pihak dalam pembangunan ekowisata didominasi oleh pemerintah, dimana dalam pengelolaannya pemerintah andil sebagai pihak pengatur, karena sumber daya masyarakat setempat minim memahami konsep pengembangan ekowisata.

Fakta yang disajikan oleh studi terdahulu memperlihatkan bahwa harmonisasi antar pihak dalam pembangunan ekowisata di berbagai negara sama, yaitu masih didominasi oleh pemerintah dan minim campur tangan masyarakat lokal. Padahal dalam pembangunan wisata, harmonisasi antar pihak berperan penting dalam membentuk ekowisata, baik itu dari pemerintah, masyarakat, bahkan wisatawan (Duran et al., 2015; Mukti et al., 2020; Pichler et al., 2017; Risfandini, A., 2017). Atas hal tersebut, urgensi penelitian ini adalah membentuk satu konsep ekowisata berkelanjutan di kawasan ekowisata Sunge Jinkem yang dikelola dengan seimbang oleh SDM sekitarnya. Konsep ekowisata yang digagas dalam studi ini akan menitikberatkan pada pengelolaan aset tidak berwujud (*Intangible Asset*), yaitu jenis aset dalam akuntansi yang tidak memiliki bentuk fisik, tetapi memiliki nilai ekonomi dan manfaat

ekonomi di masa depan. *Intangible asset* dalam pengembangan ekowisata ini mengacu pada elemen-elemen seperti *goodwill*, reputasi, pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat setempat untuk meningkatkan nilai ekowisata secara keseluruhan, dalam studi ini fokus pada *community investment* sebagai aset (Rosdini, 2016). Selain fokus pada *intangible asset*, studi ini juga fokus pada harmonisasi *three parties*, yang terdiri dari pemerintah (pemangku kebijakan) masyarakat (pengelola ekowisata), dan wisatawan (penikmat dan sumber ekonomi destinasi wisata) melalui konsep CIDBER, ekowisata yang terbentuk di lingkungan Sunge Jinkem diharapkan benar-benar tumbuh sebagai ekowisata yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mengungkap dan mendeskripsikan hasil penelitian secara mendalam (J. W. Creswell, 2007; W. J. Creswell & Creswell, 2018; Siggelkow, 2007). Lebih lanjut, pendekatan penelitian studi kasus digunakan untuk mengkaji kondisi alam dan objek potensial ekowisata di Kabupaten Bekasi (Tabel 1).

Tabel 1. Kondisi Alam di Kabupaten Bekasi

No	Kecamatan	Luas	Objek Potensial	Objek Turis
1.	Muara Gembong	140,09 km ²	Api-Api, pidada, atep, dan jeruju (Tanaman konservasi laut)	1. Pantai Muara Beting 2. Muara Bendera 3. Pantai Mekar 4. Muara Bungin
2.	Tarumajaya	54,63km ²	Hutan <i>Mangrove</i> , Wisata Perahu, Tambak Ikan, Budidaya Rumput Laut	1. Jembatan Cinta 2. Sungai Rindu 3. Sunge Jinkem
3.	Babelan	63,60 km ²	Agrikultur	1. –

Sumber: Data Sekunder (2020)

Melalui data dalam Tabel 1, studi ini mencoba menggali pendapat *stakeholder* Kabupaten Bekasi yang terlibat dalam pembangunan ekowisata, dan diperoleh Sunge Jinkem yang terletak di Kecamatan Tarumajaya sebagai objek penelitian, dengan pertimbangan (1) Sunge Jinkem merupakan ekowisata yang memiliki *human capital* tinggi, dimana pengelolannya berasal dari masyarakat, yaitu Forum Pemuda Peduli Lingkungan (FPPL), (2) Jumlah kunjungan wisatawan relatif besar, sekitar 2.500 pengunjung per minggu, (3) memiliki kerja sama dengan berbagai instansi baik pemerintah maupun swasta, (4) Sunge Jinkem menjadi *Role Model* pembangunan ekowisata bahari di Kabupaten Bekasi, dan (5) Sunge Jinkem memiliki potensi alam unik, yaitu habitat *mangrove* berkembang biak, sehingga mampu dijadikan lingkungan konservasi.

Studi ini juga mengidentifikasi apa saja yang perlu diinvestasikan dalam membentuk keberlanjutan ekowisata dengan menggunakan *Root Cause Analysis* (RCA). Studi ini merumuskan permasalahan dasar pada objek penelitian terkait peran harmonisasi perilaku antar pihak dalam konsep ekowisata CIDBER, dan bagaimana *community investment* sebagai *intangible asset* mampu mendorong terciptanya ekowisata berkelanjutan. Penggunaan RCA dalam metodologi penelitian ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi apakah *community investment* berpengaruh besar terhadap keberlanjutan ekowisata atau sebaliknya (Thomas, 2011). Melalui pemetaan rumusan masalah RCA, kemudian disusun pertanyaan wawancara untuk mendapatkan data, sehingga penelitian ini menjadi studi kasus yang dapat

memberikan makna pengelolaan *community investment* sebagai aset tidak berwujud dalam keberlanjutan ekowisata masyarakat pesisir Kabupaten Bekasi.

Studi ini diawali dengan melakukan pengumpulan data sejak tahun 2020 melalui wawancara tidak terstruktur dan observasi mendalam hingga tahun 2022 di Desa Sembilangan-Samudrajaya, tempat Ekowisata Sunge Jingkem berada. Hasil wawancara dan observasi didukung oleh *Focus Group Discussion* (FGD) untuk memperkuat hasil penelitian. Tahap awal pengumpulan data dilakukan untuk membuktikan pengelolaan aset tidak berwujud *community investment* dengan pengembangan ekowisata di Sunge Jingkem melalui keterlibatan Forum Pemuda Peduli Lingkungan (FPPL) sebagai wadah penggiat ekowisata. Informan kunci yang menjadi narasumber dalam penelitian dapat dilihat dalam tabel berikut.

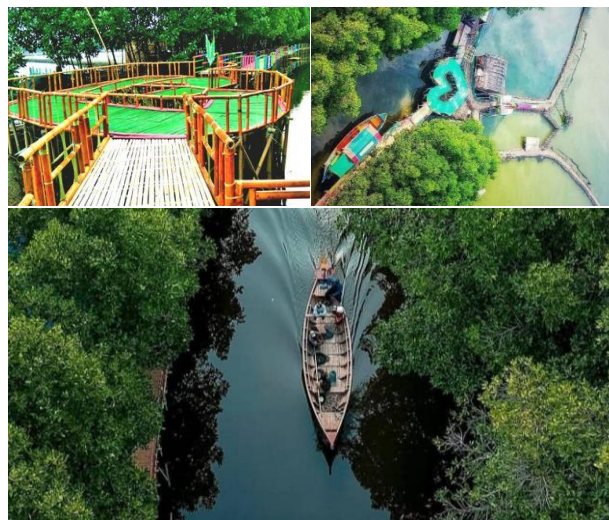
Tabel 2. Informan Kunci

Nama	Posisi/Jabatan
I1	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bekasi
I2	Kasubdit Pemberdayaan Masyarakat Pemda Kabupaten Bekasi
I3	Kepala Desa Samudrajaya
I4	Wakil Ketua Penggiat Muda (Forum Pemuda Peduli Lingkungan Sunge Jingkem)
I5	Sekretaris Desa Pantai Bahagia, Desa Kecamatan Muara Gembong, Muara Gembong
I6	Kepala Kecamatan Pantai Bakti

Sumber: Penulis (2020)

Data penelitian diperoleh secara tatap muka dengan rekaman suara yang ditranskrip. Selain data primer, studi ini juga mengumpulkan data sekunder berupa demografi sumber daya alam dan SDM di desa Samudrajaya sebagai desa pesisir di Bekasi.

Selanjutnya tahap observasi, studi ini mengamati lingkungan Sunge Jingkem secara langsung untuk menganalisis potensi Sunge Jingkem sebagai destinasi ekowisata dan melihat program pemberdayaan yang digagas oleh masyarakat untuk pengembangan ekowisata di wilayah pesisir Kabupaten Bekasi. Observasi menekankan pada bagaimana perilaku antar pihak mampu menghasilkan informasi akuntansi dan desain pengelolaan yang baik terkait ekowisata berkelanjutan. Melalui observasi lapangan, studi ini menemukan bahwa selain didukung oleh SDA yang sejak awal menarik untuk dikembangkan (terlihat pada Gambar 1), ekowisata Sunge Jingkem juga betul didukung oleh *community investment* yang terlihat dari aktivitas Forum Pemuda Peduli Lingkungan (FPPL) Sunge Jingkem, Kampung Sembilangan.



Gambar 1. Kawasan Ekowisata Sunge Jingkem
Sumber: Kememparekraf (2023)

Guna memperkaya data, studi ini melakukan FGD untuk menjaring informasi dan menghimpun pengembangan hasil rumusan temuan lapangan saat wawancara dan observasi. FGD dilakukan terhadap 12 peserta selaku penggiat ekowisata. Pemilihan peserta mempertimbangkan pengetahuan dan kedekatan responden terhadap aktivitas pengelolaan ekowisata Sunge Jingkem. Pelaksanaan FGD terjadi dalam 2 tahap (Tabel 3) di kantor kelurahan Samudrajaya. Melalui FGD, studi ini memberikan hasil perumusan terkait konsep Ekowisata Sunge Jingkem. Hasil FGD memperkuat temuan data, karena diperoleh bahwa selain wujud *community investment*, FPPL yang sudah terbentuk di Sunge Jingkem juga merupakan sumber daya modal manusia (Human Capital) utama terhadap keberhasilan pembentukan ekowisata berkelanjutan.

Tabel 3. Pelaksanaan FGD

Keterangan	Tenaga Ahli dan pendamping	Waktu	Peserta FGD
FGD I	Peneliti dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta: Dr. Asep Kamaluddin, S.Ag., M.Si Dr. Kusumajanti, M.Si Dr. Ni Putu Eka Widiastuti, M.Si., CSRS Pendamping dari UIN Jakarta	26 Agustus 2020 Pukul 09.00-13.00 wib	1. Pemda TK II Kab Bekasi (Balitbang) 2. Kepala Desa Samudrajaya 3. Pengurus BumDes 4. Perwakilan FPPL 5. Masyarakat Kampung Sembilangan 6. Masyarakat Desa Samudrajaya
FGD II	Peneliti dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta: Dr. Asep Kamaluddin, S.Ag., M.Si Dr. Kusumajanti, M.Si Dr. Ni Putu Eka Widiastuti, M.Si., CSRS Pendamping dari UIN Jakarta	8 Oktober 2020 Pukul 09.00-13.00 wib	1. Pemda TK II Kab Bekasi (Balitbang) 2. Kepala Desa Samudrajaya 3. Pengurus BumDes 4. Perwakilan FPPL 5. Masyarakat Kampung Sembilangan 6. Masyarakat Desa Samudrajaya

Sumber: Penulis (2020)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Merujuk pada hasil temuan dan analisis data, SDA di Sunge Jingkem sebagai desa pesisir berpotensi besar dikembangkan menjadi destinasi ekowisata unggulan. Sunge Jingkem yang merupakan kawasan hutan *mangrove* pinggir pesisir dan tempat berkembangbiaknya ikan tawar dapat dibentuk sebagai desa sadar wisata (Dakota) yang mengedepankan harmonisasi *three parties* sebagai pihak pengelola.

Namun, harmonisasi *three parties* hanya akan terbentuk jika ada harmonisasi dalam perilaku antar pihak, yang akhirnya berpengaruh terhadap informasi akuntansi yang diperoleh dalam pembentukan desain konsep ekowisata berkelanjutan (Widowati et al., 2019). Harmoni ini dapat dibentuk dengan keterlibatan antara masyarakat dan FPPL sebagai aktor terdekat dan paling mengetahui kondisi Sunge Jingkem, Pemerintah Kabupaten Bekasi sebagai pihak yang berwenang atas penegakan kebijakan, dan Wisatawan Sunge Jingkem sebagai sumber ekonomi utama destinasi ekowisata.

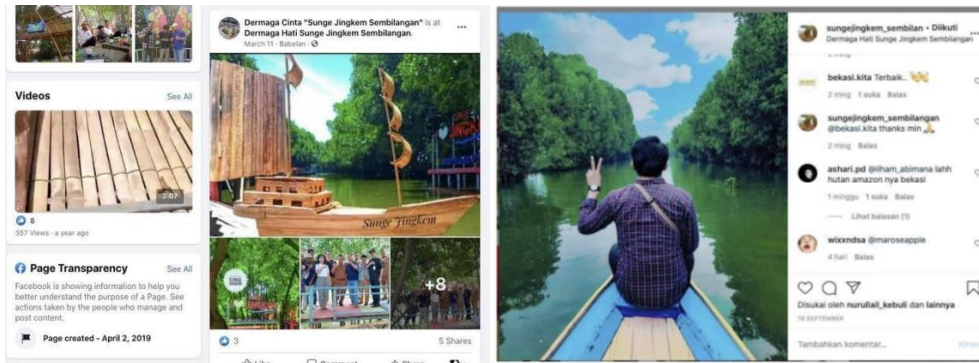
CIDBER Sebagai Konsep Ekowisata Berkelanjutan

Pemberdayaan yang berkelanjutan dari sektor pariwisata, khususnya ekowisata mampu mengangkat kualitas manusia, ekonomi dan peradaban dari suatu negara, sehingga bagaimana menjaga keberlanjutan dengan tetap harmonis antara manusia, lingkungan dan pemilik semesta raya menjadi konsep harmonisasi dalam pengelolaan pariwisata berkelanjutan (Richards. & Hall., 2000; Wurlianty, 2020). CIDBER (*Community Investment for The Development of Bekasi Regency*) merupakan konsep *Harmonization for the Sustainability of Ecotourism* (harmonisasi keberlanjutan ekowisata) yang menggabungkan unsur SDA dan SDM untuk membentuk ekosistem daya tarik wisata yang kuat dalam mendukung ekowisata berkelanjutan di Sunge Jinkem. Pengelola Sunge Jinkem memaknai harmonisasi yang dimaksud untuk menjaga hubungan harmonis dengan *three parties* (Pemerintah-Masyarakat-Wisatawan) ini terlihat pada kesepahaman antara masyarakat sekitar, FPPL ekowisata Sunge Jinkem, Pemerintah Kabupaten Bekasi, dan para Wisatawan dalam menciptakan ekowisata berkelanjutan (Mukti et al., 2020).



Gambar 2. Harmonisasi *Three Parties* dalam konsep CIDBER
Sumber: Penulis (2020)

Berdasarkan hasil wawancara, observasi lapangan, dan FGD, studi ini menunjukkan bahwa kekuatan *community investment* Ekowisata Sunge Jinkem berada di bawah FPPL yang berperan sebagai *human capital* utama untuk membawa Sunge Jinkem sebagai ekowisata berkelanjutan, dengan kata lain FPPL menjadi *intangible asset* dan berperan penting menjadi *main actor* pada *three parties* dalam pengelolaan ekowisata. Posisi FPPL sebagai *intangible asset* memenuhi mayoritas syarat penentuan aset tidak berwujud, yaitu *goodwill*, reputasi, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat setempat untuk membentuk ekowisata yang baik (Rosdini, 2016). Pertama, FPPL menjadi penggiat wisata yang aktif mempromosikan destinasi Sunge Jinkem untuk menarik pengunjung, sehingga Sunge Jinkem dapat memiliki basis pengunjung yang solid dan tinggi atas interaksi melalui kanal sosial media Ekowisata. Alasan selanjutnya, FPPL mayoritas merupakan sumber daya produktif, dalam hal ini pemuda melek teknologi yang dapat dengan mudah memanfaatkan sosial media untuk memperkuat branding ekowisata. FPPL yang berisikan anak muda juga cenderung berpengetahuan luas dan kreatif, sehingga mampu menghadirkan inovasi baru di destinasi (Gambar 3).



(a) Sosial Media Ekowisata Sunge Jingkem Sebagai Sarana Promosi dan Branding



(b) Logo FPPL Sunge Jingkem Sebagai Identitas Pengelola

Gambar 3. Inovasi FPPL Ekowisata Sunge Jingkem

Sumber: Penulis (2023)

Anggota FPPL sebagai wujud *intangible asset* ekowisata Sunge Jingkem juga membawa ekonomi masyarakat sekitar meningkat di sekitar ekowisata, ini terlihat dengan terbukanya peluang bagi masyarakat sekitar yang tidak berpenghasilan atau sedang mencari penghasilan untuk sekedar berdagang, mulai dari wisata kuliner, cinderamata, sampai memanfaatkan rumah warga yang layak untuk dijadikan tempat penginapan. Hasil temuan studi ini terlihat dalam FGD dan observasi yang telah dilakukan. Kecakapan FPPL dalam pembangunan ekonomi juga diperkuat dengan pernyataan Wakil Ketua FPPL selaku I4, saat wawancara di kawasan ekowisata Sunge Jingkem, yang menyatakan:

“Forum Pemuda Peduli Lingkungan Sunge Jingkem sudah terbentuk, dan menjadi alat penggiat wisata. Sekarang bersyukur dari pengelolaan FPPL sudah terbentuk berbagai paket destinasi wisata untuk membantu perekonomian masyarakat” (Wakil Ketua Forum Pemuda Peduli Lingkungan - I4).

Namun untuk melanggengkan keberlanjutan ekowisata dalam konsep CIDBER, dibutuhkan peran pihak lain, seperti yang terlihat dalam gambar 2, pihak yang tidak kalah penting yaitu pemerintah daerah, dalam hal ini Pemda berperan membuat kebijakan dan memberikan dukungan kepada FPPL dan masyarakat Sunge Jingkem sebagai pengelola ekowisata untuk bekerjasama dengan pihak ketiga, yaitu instansi atau swasta, agar masyarakat di Kabupaten Bekasi lebih mandiri secara ekonomi.

Berdasarkan hasil temuan studi, Pemerintah Kabupaten Bekasi selaku Pemda berperan memberikan dukungan terhadap ekowisata dengan cara terlibat dalam pengawasan kerjasama kerelawanan yang diadakan dengan pengurus FPPL. Pemda bekerjasama dengan Yayasan Pendidikan Islam di Bekasi, didukung oleh Forum Wartawan Daring Bekasi yang menggalang dana untuk kegiatan ekowisata dan penyediaan fasilitas

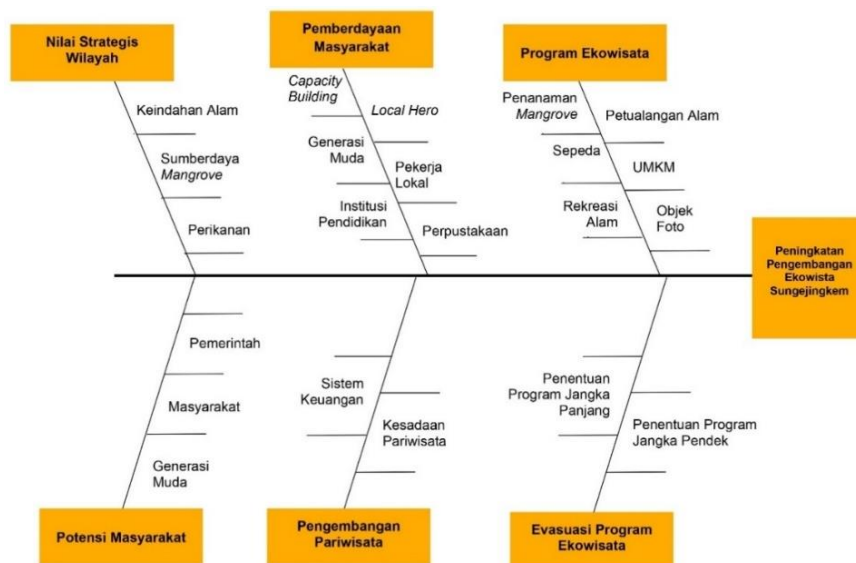
destinasi wisata. Selain itu, pemda juga mendukung pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility*, seperti kerja sama dengan PT. PJB UP Muara Tawar dalam penanaman, pembangunan *tracking*, pelatihan pengolahan *mangrove*, sosialisasi cinta lingkungan dan pesisir bersih.

Sedangkan untuk wisatawan dalam konsep CIDBER, perannya tidak hanya terbatas menjadi pengunjung yang membayar tiket masuk sebagai aset ekonomi, tetapi juga berdampak pada sosial dan lingkungan destinasi. Di era teknologi ini, wisatawan yang berkunjung ke Sunge Jingkem kerap mengunggah momen berwisata mereka ke sosial media, dan tak jarang berdiskusi terkait spot-spot yang menarik dikunjungi atau bercengrama tentang alam yang terjadi di Sunge Jingkem. Ini membuat destinasi ekowisata Sunge Jingkem semakin dikenal luas dan membentuk budaya wisatawan yang solid dan sadar lingkungan. Berdasarkan observasi, studi ini menemukan wisatawan Sunge Jingkem aktif memuat blog, vlog, diskusi terbuka dan sharing pengalaman berkunjung mereka di destinasi ekowisata Sunge Jingkem melalui sosial media Blog, YouTube, Instagram, Facebook yang terkoneksi dengan sosial media resmi Sunge Jingkem membentuk FPPL, sehingga perkembangan wisata semakin luas.

Program CIDBER Mewujudkan Ekowisata Berkelanjutan

Mengetahui jalinan harmonisasi antar pihak pada sub bab sebelumnya mengantarkan studi ini pada pembahasan lebih lanjut. Fakta yang menyajikan peran masing-masing pihak, mulai dari FPPL-Masyarakat, Pemerinath, dan Wisatawan Ekowisata Sunge Jingkem untuk membentuk ekowisata berkelanjutan di Kabupaten Bekasi ini membutuhkan program nyata yang diharapkan dapat terealisasi.

Membentuk ekowisata dengan harapan berkelanjutan yang harmonis membutuhkan kesadaran untuk membangun, meningkatkan atau mempertahankan ekowisata berdasarkan kerja sama dan siap untuk bertransformasi. Transformasi yang dimaksud ini adalah bagaimana *three parties* dapat berbagi pengetahuan dan mencari solusi tanpa melihat latar belakang seseorang atau memandang sebelah pihak, karena sejatinya seluruh pihak sama penting (Sue, 2006). Konsep CIDBER dengan FPPL sebagai *intangible asset* dapat dirumuskan dalam program-program pembangunan *triple bottom line sustainability*. Hal tersebut dapat menjadi pilar dasar Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk mengembangkan keberlanjutan destinasi wisata lainnya dalam beberapa tahun ke depan (Gambar 4).



Gambar 4. Roadmap Pembentukan Program CIDBER

Sumber: Penulis (2020)

Perwujudan dari *roadmap* yang digagas tersebut dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 4. Program Gagasan CIDBER

No	Program	Realisasi	Dampak
1	Capacity Building dan dukungan produksi	<ul style="list-style-type: none"> a. Mendukung produksi kuliner khas Bekasi dan mendukung destinasi wisata di wilayah Ekowisata Sunge Jingkem b. Memberikan pendampingan dan pelatihan secara rutin dan berkesinambungan kepada nelayan atau masyarakat pesisir c. Memberikan pendampingan dan pelatihan pengelolaan pariwisata kepada pengelola Sunge Jingkem d. Memberikan pendampingan untuk melayani dengan hati terkait bagaimana menjaga kebersihan, sopan santun dalam bertutur kata, berkomunikasi dan memberikan informasi 	<ul style="list-style-type: none"> a. Wisatawan yang berkunjung dapat merasakan nuansa pariwisata Bekasi dan menghadirkan ketertarikan terkait ekowisata di Bekasi b. Meningkatkan penjualan dengan mengolah hasil budidaya menjadi berbagai makanan khas wisata c. Peningkatan jumlah wisatawan di Sunge Jingkem d. Terwujudnya keberlanjutan lingkungan di sekitar tempat wisata
2	Membentuk Local Hero Ekowisata	<ul style="list-style-type: none"> a. Mendorong perubahan perilaku dan karakter kepemimpinan pengelola Ekowisata Sunge Jingkem b. Membangun kemandirian masyarakat sekitar dalam pemberdayaan masyarakat Sunge Jingkem 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengelola ekowisata Sunge Jingkem memiliki rasa tanggungjawab dan rasa peduli untuk memberdayakan destinasi wisata b. Masyarakat siap menjadi penggerak dan motivator untuk pembangunan berkelanjutan
3	Maksimalisasi kompetensi generasi muda di bidang pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> a. Mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan yang fokus pada bidang pariwisata b. Mendirikan Tempat Uji Kompetensi (TUK) di Kabupaten Bekasi untuk meningkatkan keterampilan pariwisata khususnya ekowisata 	<ul style="list-style-type: none"> a. Generasi muda di Sunge Jingkem tersertifikasi b. Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia dan penyerapan tenaga kerja
4	Maksimalisasi kompetensi Tenaga Kerja Lokal	<ul style="list-style-type: none"> c. Membentuk program Praktik Kerja Lapangan di tingkat SMK di Desa Samudrajaya dan Desa Sembilangan d. Memfokuskan kompetensi pekerja lokal pada sektor pangan dan teknologi informasi 	<p>Menciptakan pekerja lokal yang profesional dan memperluas sayap destinasi ekowisata Sunge Jingkem</p>
5	Membangun sekolah berwawasan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> a. Membentuk kerjasama dengan instansi pendidikan untuk pembangunan sekolah ramah lingkungan di tingkat SD, SMP, SMA/SMK b. Membentuk kurikulum dan kegiatan siswa yang berwawasan pelestarian alam dan pembangunan pariwisata 	<p>Meningkatkan kesadaran lingkungan untuk generasi mendatang dan menciptakan <i>young local hero</i></p>
6	Membangun perpustakaan digital diorama ekowisata	<ul style="list-style-type: none"> a. Membuat digital <i>tour guide</i> yang berisi informasi selama tur wisata dan dapat diakses oleh seluruh pengunjung b. Membangun <i>digital software</i> diorama yang memuat rute perjalanan, potensi alam, kuliner, budaya warga, dan spot-spot menarik di Sunge Jingkem 	<p>Membuat calon wisatawan yang pernah berkunjung ke Sunge Jingkem tergugah untuk datang kembali, ataupun merekomendasikannya kepada kolega</p>

	Program	Realisasi	Dampak
7	Pendampingan literasi keuangan berkelanjutan Menjadikan Sunge	Membangun tata kelola manajemen yang transparan dan akuntabilitas kepada pemangku kepentingan	Menguntungkan pengelola untuk mendapatkan pembiayaan dan mengembangkan bisnis dalam jangka menengah dan panjang
8	Jingkem Desa Sadar Wisata (Dakota)	Membangun desa yang ramah wisata, teratur, dan tidak mudah terpengaruh lingkungan eksternal	Terbentuknya Dakota dapat menjadikan Sunge Jingkem magnet sosial bagi calon wisatawan

Sumber: Penulis, 2020

Program-program CIDBER yang studi ini gagas terfokus pada pembangunan SDM dan SDA di bidang ekonomi, sosial dan lingkungan, dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas dan mendukung *triple bottom line sustainability* masyarakat Kabupaten Bekasi, karena program CIDBER ini memperluas dampak kesejahteraan, mengembangkan literasi produk wisata dan budaya, serta melestarikan lingkungan di sekitar lingkungan wisata. Kedepannya, hal ini juga akan mengarah pada kemampuan kawasan untuk menjadi objek wisata yang lebih besar dan lebih dikenal, baik secara nasional maupun internasional. Dengan kekuatan kualitas pelayanan global yang prima, masyarakat sekitar objek wisata dituntut untuk menyadari potensi ekonomi yang sangat besar.

Program unggulan yang digagas dalam konsep CIDBER adalah *local hero* atau individu yang berperan dalam memotivasi pengembangan obyek wisata, hal ini penting untuk menjaga *community investment* sebagai *intangibile asset* Sunge Jingkem, karena terbentuknya *local hero* dengan kemampuan memotivasi pengembangan objek wisata akan menentukan keberlangsungan objek wisata di masa yang akan datang. Kekuatan motivasi para *local hero* yang dihadirkan dalam konsep CIDBER juga tidak terlepas dari penyiapan generasi muda yang mampu menjadi generasi penerus yang menjaga nilai strategis agenda ekowisata Sunge Jingkem. Terbentuknya karakter masyarakat sebagai pengelola ekowisata yang memiliki kesadaran wisata dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kepuasan wisatawan, dan menjamin keberlangsungan daya tarik wisata tersebut.

Dampak Realisasi CIDBER Sebagai Konsep Ekowisata Berkelanjutan

Program-program CIDBER yang studi ini gagas dapat membantu *three parties* (masyarakat-pemerintah-wisatawan) untuk mewujudkan ekowisata Sunge Jingkem sebagai *long term-sustainability ecotourism*. Hal ini karena penerapan program-program CIDBER dilakukan mulai dari jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, karena proses pembangunan ekowisata berkelanjutan adalah tidak putus, artinya ekowisata yang baik akan terus memberikan inovasi. Program-program yang terealisasi juga menjadi wujud dari akuntansi keperilakuan, karena berguna untuk mengevaluasi pengelolaan ekowisata, mengukur, melaporkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan secara transparan, serta memastikan bahwa operasional wisata sejalan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan (Kabuhung, 2013). Realita ini terlihat di Sunge Jingkem dari bagaimana pembentukan program terlahir dari proses holistik, mulai dari melihat harmonisasi *three parties* dalam rantai pengelolaan ekowisata, membentuk *roadmap* CIDBER, menyajikan gagasan program, serta realisasi program.

Konsep CIDBER ekowisata Sunge Jingkem sebagai isu akuntansi keperilakuan juga ditunjukkan dari perspektif pelaporan dan pengelolaan sumber daya dalam konteks bisnis atau organisasi yang terlibat dalam industri ekowisata. Pengukuran SDA dan SDM terlihat dari FPPL yang menjadi cikal bakal operasi ekowisata, termasuk bagaimana FPPL yang

bersinergi dengan pemerintah mengelola kerjasama pengembangan ekowisata dengan mitra luar untuk memanfaatkan potensi alam Sunge Jingkem yang menarik dimata Wisatawan. Selain itu, konsep CIDBER juga mampu menggambarkan ekowisata Sunge Jingkem sebagai entitas bisnis pada masyarakat setempat dan lingkungan yang transparan, karena pengelolaan didalamnya tidak didominasi oleh satu pihak, melainkan mencakup unsur masyarakat, pemerintah dan wisatawan.

Hasil akhir dari realisasi program CIDBER pada destinasi ekowisata Sunge Jingkem dapat menciptakan kemampuan Kualitas Layanan Global Luar Biasa (*Global Service Quality Excellent*) yang mengedepankan pelayanan, kepuasan wisatawan, dan kemampuan menjadikan objek wisata lebih besar dan lebih dikenal baik secara nasional maupun internasional. Dengan kemampuan *Global Service Quality Excellent*, masyarakat di sekitar objek wisata dituntut untuk menyadari besarnya potensi Sunge Jingkem yang dapat menunjang kesejahteraan masyarakat sekitar. Selain itu, konsep CIDBER juga secara spesifik dapat diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan berkelanjutan, hal ini terlihat dari program pendampingan untuk menjamin terciptanya pengelolaan keuangan yang akuntabel.

Adanya peningkatan pelayanan, SDM, penyiapan generasi muda, pembangunan pusat informasi, dan sistem pengelolaan keuangan yang baik dari program CIDBER, berdampak juga dalam mendukung terwujudnya program berkelanjutan. Pemerintah telah menyusun strategi untuk mencapai keberlanjutan di berbagai sektor, dengan komitmen globalnya untuk mengupayakan kesejahteraan masyarakat dan harapan dapat mencapai tujuan keberlanjutan pada tahun 2030. Melalui 17 tujuan *Sustainability Development Goals* (SDGs), konsep CIDBER yang diusung oleh studi ini sangat erat kaitannya untuk mendukung SDGs dengan mempertimbangkan klasifikasi tujuan *triple bottom line sustainability* (United Nation Indonesia, 2022).

Peran dan harmonisasi antar pihak yang masuk kedalam konsep CIDBER dapat mendukung pilar ekonomi SDGs *Decent Work and Economic Growth* (tujuan 8), dimana konsep CIDBER menghadirkan pemberdayaan masyarakat pesisir melalui peningkatan kapasitas keterampilan, pelatihan dan pengembangan potensi alam yang mampu menyediakan lapangan pekerjaan yang layak. Selain itu, peningkatan keterampilan akibat peningkatan kapasitas masyarakat juga akan mempengaruhi kualitas destinasi ekowisata sehingga pemanfaatannya akan berdampak pada pembangunan ekonomi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Indonesia.

Pada pilar sosial, yaitu ekowisata Sunge Jingkem dapat didorong untuk mendukung pengembangan *No Poverty* (tujuan 1) dan pengembangan *Quality Education* (tujuan 4). Melalui program membentuk *Local Hero*, mengembangkan potensi generasi muda, menyiapkan tenaga kerja lokal melalui pendidikan yang diperuntukkan bagi masyarakat pesisir, dan pemenuhan sarana dan program pendidikan berupa implementasi CTP, kehadiran ekowisata dengan konsep CIDBER dapat menekan masyarakat untuk bergerak maju dan berorientasi ke masa depan guna menumbuhkan rasa kebersamaan mencapai tujuan SDGs pilar sosial.

Pada pilar lingkungan, ekowisata dengan konsep CIDBER dapat didorong untuk mendukung *Sustainable Cities and Communities* (tujuan 11), *Life Below Water* (tujuan 14), dan *Life on Land* (tujuan 15). Pengembangan Dakota yang hadir dalam konsep CIDBER membawa masyarakat sadar lingkungan. Tidak hanya itu, kemandirian kawasan Sunge Jingkem sebagai destinasi ekowisata juga dapat dijadikan model ideal bagi daerah lain di Indonesia terkait bagaimana membentuk destinasi wisata yang tidak hanya memiliki nilai ekonomi tetapi juga fokus pada pembangunan sosial dan lingkungan sehingga kemandirian itu dapat mendukung SDGs.

KESIMPULAN

Konsep CIDBER yang mengutamakan *community investment* sebagai *intangible asset* menjadi pilihan tepat dalam membentuk pembangunan ekowisata berkelanjutan. CIDBER juga menjadi bentuk informasi akuntansi keperilakuan yang berhasil memadukan peran *three parties* menjadi desain/konsep akuntansi dengan mengedepankan harmonisasi antara tiga pihak yaitu FPPL-masyarakat, pemerintah, dan wisatawan. Selain mampu meningkatkan pembangunan ekonomi, CIDBER juga mampu mendukung keberlanjutan pilar sosial dan lingkungan. Konsep ekowisata berkelanjutan yang melibatkan harmonisasi antar pihak dengan peran *community investment* sebagai aktor utama penggerak ekowisata menjadi kebaruan dalam studi ekowisata berkelanjutan, karena studi terdahulu mengungkapkan peran pemerintah menjadi yang dominan. Studi ini diharapkan memberikan implikasi kepada pengelola destinasi ekowisata lain di Kabupaten Bekasi, terkait konsep, program, dan strategi pencapaian ekowisata berkelanjutan di kawasan pesisir Kabupaten Bekasi. Selain itu, studi ini diharapkan berimplikasi dalam menggali potensi masyarakat pesisir membangun destinasi ekowisata berkelanjutan untuk mencapai kesejahteraan dan kemandirian dalam aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.

Studi ini menghasilkan wawasan berharga tentang pengelolaan *intangible assets* dalam konteks ekowisata. Namun, studi ini memiliki keterbatasan yang perlu diperhatikan bahwa *intangible asset* sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor budaya dan sosial, oleh karena itu studi ini memerlukan waktu yang cukup lama untuk memahami aspek-aspek budaya dan sosial yang mungkin memengaruhi pengelolaan *intangible asset* yang mendukung ekowisata berkelanjutan di Sunge Jinkem.

Meskipun terdapat keterbatasan dalam studi ini, hasil yang tersaji tetap dapat memberikan wawasan yang berguna terkait pengelolaan *intangible asset* dalam ekowisata berkelanjutan. Studi lebih lanjut diharapkan dapat mengungkap sinergi *three parties* dalam konsep CIDBER fokus pada kajian empiris pengelolaan *intangible asset* dalam keberlanjutan ekowisata. Studi ini juga menyarankan penelitian berikutnya untuk mengikutsertakan peran serta komunitas masyarakat dalam sinergi mewujudkan pemberdayaan masyarakat pada destinasi Ekowisata.

DAFTAR PUSTAKA

- Andita, R. P., & Kahfi, F. (2019). Pengelolaan Lingkungan Melalui Ekowisata Berbasis Masyarakat di Taman Nasional Tesso Nilo-Riau. *Jurnal Daya Saing*, 5(3), 261–272. <https://doi.org/10.35446/dayasaing.v5i3.404>
- Arias Schreiber, M., Wingren, I., & Linke, S. (2020). Swimming upstream: community economies for a different coastal rural development in Sweden. *Sustainability Science*, 15(1), 63–73. <https://doi.org/10.1007/s11625-019-00770-0>
- Bataille, C. Y., Luke, K., Kruger, T., Malinen, S., Allen, R. B., Whitehead, A. L., & Lyver, P. O. '. (2020). Stakeholder Values Inform Indigenous Peoples' Governance and Management of a Former National Park in New Zealand. *Human Ecology*, 48(4), 439–453. <https://doi.org/10.1007/s10745-020-00170-4>
- Bhuiyan, M. A. H., Siwar, C., & Ismail, S. M. (2016). Sustainability Measurement for Ecotourism Destination in Malaysia: A Study on Lake Kenyir, Terengganu. *Social Indicators Research*, 128, 1029–1045.
- Creswell, J. W. (2007). *Qualitative Inquiry & Research Design: choosing among five approaches*. In Sage Publications, Inc. (Vol. 2).
- Creswell, W. J., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9).

- file:///C:/Users/Harrison/Downloads/John W. Creswell & J. David Creswell - Research Design_ Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (2018).pdf%0Afile:///C:/Users/Harrison/AppData/Local/Mendeley Ltd./Mendeley Desktop/Downloaded/Creswell, Cr
- Dahuri, R., Rais, J., Ginting SP., & S. M. J. (2008). *Pengelolaan Terpadu Sumber Daya Pesisir dan Lautan*. Pradnya Paramitha Press.
- Duran, D. C., Gogan, L. M., Artene, A., & Duran, V. (2015). The Components of Sustainable Development - A Possible Approach. *Procedia Economics and Finance*, 26(15), 806–811. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(15\)00849-7](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(15)00849-7)
- Gumede, T. K., & Nzama, A. T. (2019). Ecotourism as a mechanism for local economic development: The case of communities adjacent to the Oribi Gorge Nature Reserve, KwaZulu-Natal, South Africa. *African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure*, 8(4), 1–19.
- Imur, N., & Junaeda, S. (2022). Pengembangan Etno-Ecotourism pada Taman Nasional Komodo Kabupaten Manggarai Barat. *Jurnal Kajian Sosial Dan Budaya*, 6(2), 58–67. <http://www.ejournal.tebarscience.com/index.php/JKSB>
- Iskandar. (2015). *Potensi Kelautan Baru Dimanfaatkan 22 persen*. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. <http://lipi.go.id/berita/single/Potensi-Kelautan-Baru-Dimanfaatkan-22-persen/10454>
- Kabuhung, M. (2013). Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Untuk Perencanaan dan Pengendalian Keuangan pada Organisasi Nirlaba Keagamaan. *EMBA*, 1(3), 339–348.
- Kalther, J., & Itaya, A. (2021). Identifying Priority Areas for Coastal Protection Around Java, Indonesia. *Jurnal Segara*, 17(1), 43. <https://doi.org/10.15578/segara.v17i1.9997>
- Mukti, A. B., Rosyid, A. N., & Asmoro, E. I. (2020). Model Penyahelix Dalam Sinergi Pariwisata di Indonesia Untuk Pemberdayaan Perekonomian Lokal: Studi Literatur. *Hospitality*, 9(1), 1–7.
- Mulyana, E. (2019). Upaya Pemberdayaan Ekonomi, Sosial dan Budaya pada Masyarakat Melalui Pengembangan Bisnis Ekowisata. *Business Innovation and Entrepreneurship Journal*, 1(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.35899/biej.v1i1.12>
- Neumann, B., Ott, K., & Kenchington, R. (2017). Strong sustainability in coastal areas: a conceptual interpretation of SDG 14. *Sustainability Science*, 12(6), 1019–1035. <https://doi.org/10.1007/s11625-017-0472-y>
- Palmer, N. J., & Chuamuangphan, N. (2018). Governance and local participation in ecotourism: community-level ecotourism stakeholders in Chiang Rai province, Thailand. *Journal of Ecotourism*, 17(3), 320–337. <https://doi.org/10.1080/14724049.2018.1502248>
- Pichler, M., Schaffartzik, A., Haberl, H., & Görg, C. (2017). Drivers of society-nature relations in the Anthropocene and their implications for sustainability transformations. *Current Opinion in Environmental Sustainability*, 26–27, 32–36. <https://doi.org/10.1016/j.cosust.2017.01.017>
- Richards., G., & Hall., D. (2000). *Tourism and Sustainable Community Development*. Routledge. <https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9780203464915>
- Risfandini, A., S. (2017). The application of the carrying capacity concept for sustainable coastal resources development in Indonesia. *International Conference*, 1(1), 1–17.
- Rosdini, D. (2016). Relevansi Nilai Aset Tak Berwujud. *Jurnal Akuntansi*, 8(1), 65–85.
- Saksono, H. (2013). Ekonomi Biru: Solusi Pembangunan Daerah Berciri Kepulauan Studi Kasus Kabupaten Kepulauan Anambas. *Jurnal Bina Praja*, 05(01), 01–12. <https://doi.org/10.21787/jbp.05.2013.01-12>
- Siggelkow, N. (2007). Persuasion with case studies. *Academy of Management Journal*, 50(1), 20–24.
- SKPT. (2023). *Visi dan Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan*. Kementerian Kelautan Dan Perikanan. <https://kkp.go.id/SKPT/page/981-visi-dan-misi>
- Sue, B. (2006). *Pengembangan Masyarakat melalui Pariwisata*. CSIRO.
- Sultana, A. (2022). Ecotourism and Sustainable Socio-Economic Development: The Case of

- Hyderabad , Telangana State. *International Journal of Modern Developments in Engineering and Science*, 1(1), 8-11.
- Sunu Sri Giriwati, N., Hawa, L. C., Pamungkas, S. T., Iyati, W., & Hidayat, A. R. T. (2019). Local Community Participation in Ecotourism Development: the Case of Sumberwangi Hamlet Destination, East Java, Indonesia. *PEOPLE: International Journal of Social Sciences*, 5(1), 81-98. <https://doi.org/10.20319/pijss.2019.51.8198>
- Thomas, G. (2011). A Typology for the Case Study in Social Science Following a Review of Definition, Discourse, and Structure. *Qualitative Inquiry*, 17(6). <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/1077800411409884>
- Trinanda, T. C. (2017). Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia Dalam Rangka Pembangunan Berbasis Konservasi Lingkungan. *Jurnal Matra Pembaruan*, 1(Inovasi kebijakan), 75-84. <http://jurnal.kemendagri.go.id/index.php/mp/article/view/398/258>
- United Nation Indonesia. (2022). *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*. United Nation. <https://indonesia.un.org/id/sdgs>
- Widowati, S., Ginaya, G., & Triyuni, N. N. (2019). Penta helix model to develop ecotourism. *International Journal of Social Sciences and Humanities*, 3(2), 31-46. <https://doi.org/10.29332/ijssh.v3n2.288>
- Wurlianty, B. (2020). Pengelolaan Ekowisata Berkelanjutan (Sustainable Ecotourism) di Seram Utara dan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah. *Jurnal Riset Perikanan Dan Kelautan*, 2(1), 135-149.